

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik adalah alat yang ampuh untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Dari organisasi politik untuk melahirkan urgensi partai politik untuk melahirkan pameo dalam masyarakat “Politisi modern tanpa partai politik bagaikan ikan tanpa air”.¹

Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politik kelompok manusia yang terorganisir untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan, dengan maksud mensejahterakan anggotanya, baik untuk kebijaksanaan keadilan, maupun untuk hal-hal yang bersifat materil. Sementara itu, R. H. Soltau mengemukakan definisinya tentang partai politik sebagai kelompok warga negara terorganisasi dan bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.²

Ramlan Surbakti dalam bukunya yang berjudul Memahami Ilmu Politik, menyebutkan ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal-usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori

¹ DJohermansah Djohan,dkk, *System KePartaian dan Pemilu*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka. Jakarta, 2002., hlm 15.

² Soelistyati, Ismail Ghani, *Pengantar Ilmu Politik*, 1989, hlm 111-112.

pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.³

Teori yang pertama mengatakan partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif (dan eksekutif) karena ada kebutuhan para anggota parlemen (yang ditentukan berdasarkan pengangkatan) untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat. Setelah partai politik terbentuk dan menjalankan fungsi, kemudian muncul partai politik lain yang dibentuk oleh kalangan masyarakat. Partai politik yang terakhir ini biasanya dibentuk oleh kelompok kecil pemimpin masyarakat yang sadar politik berdasarkan penilaian bahwa partai politik yang dibentuk pemerintah tidak mampu menampung dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Teori kedua menjelaskan krisis situasi historis terjadi manakala suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern yang berstruktur kompleks. Pada situasi ini terjadi berbagai perubahan, seperti penambahan penduduk karena perbaikan fasilitas kesehatan, perluasan pendidikan, mobilitas okupasi, perubahan pola pertanian dan industri, partisipasi media, urbanisasi, ekonomi berorientasi pasar, peningkatan aspirasi dan harapan-harapan baru, dan munculnya gerakan-gerakan populis.

Perubahan-perubahan itu menimbulkan tiga macam krisis, yakni legitimasi, integrasi, dan partisipasi. Artinya, perubahan-perubahan mengakibatkan masyarakat mempertanyakan prinsip-prinsip yang mendasari

³ Subakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm

legitimasi kewenangan pihak yang memerintah; menimbulkan masalah dalam identitas yang menyatukan masyarakat sebagai suatu bangsa; dan mengakibatkan timbulnya tuntutan yang semakin besar untuk ikut serta dalam proses politik. Untuk mengatasi tiga permasalahan inilah partai politik dibentuk.

Teori ketiga melihat modernisasi sosial ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan negara seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi, dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan, melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut. Jadi, partai politik merupakan produk logis dari modernisasi sosial ekonomi.

Jika kita telusuri dari sejarah kelahiran partai politik, pada mulanya ia terinspirasi oleh bagaimana sejatinya elemen kemasyarakatan menyalurkan aspirasinya kepada penguasa. Hal tersebut terjadi di sejumlah negara Eropa yang menganut sistem monarki, dimana kekuasaan atas negara dan pemerintahan secara absolut dipegang oleh kerajaan yang berkuasa secara mutlak. Untuk menyalurkan aspirasi mereka dalam kekuasaan negara yang begitu kuat, oleh segolongan masyarakat kemudian menggabungkan dirinya dalam kelompok-kelompok untuk secara bersama-sama menyalurkan aspirasinya, yang dalam perkembangannya kelompok-kelompok itu kemudian mendapatkan pengakuan dalam sistem politik kenegaraan, kemudian disebut dengan "Partai Politik".

Pada perkembangan selanjutnya, partai politik tidak lagi diorientasikan semata untuk penyaluran aspirasi, tetapi pada prakteknya juga dimanfaatkan oleh elitnya untuk menjadi instrumen pencapaian posisi dan kedudukannya di lembaga formal, baik di lembaga perwakilan aspirasi pendukungnya (legislatif), maupun di jajaran pemerintahan (eksekutif), dengan argumentasi bahwa aspirasi yang disampaikan hanya mungkin efektif pencapaiannya, jika kedudukan dalam kekuasaan legislatif dan eksekutif dapat diraih, kekuasaan legislatif dan eksekutif inilah yang difungsikan untuk mensejahterakan pendukung dan anggotanya.

Pemilihan umum yang telah berlangsung beberapa waktu yang lalu cukup membuktikan posisi partai demokrat yang keluar sebagai pemenang yang perolehan suaranya cukup jauh dari lawan-lawan politik yang ikut dalam pemilihan umum 2009 yang merupakan partai besar dan memiliki dukungan yang cukup. Semua itu dianggap tidak lepas dari sosok SBY sebagai pemimpin partai akan tetapi disini penulis akan lebih spesifik meneliti akan adanya instrument lain dalam kemenangan partai demokrat yakni proses pengkaderan yang terjadi khususnya pada DPD demokrat kota Yogyakarta yang pada pemilu juga memperoleh kemenangan. Khusus untuk Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan basis massa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sejak dahulu selalu menang dengan suara yang dominan, Akan tetapi semenjak kehadiran partai demokrat suara yang dulu selalu diraup kini berpindah dengan signifikan ke Partai Demokrat yang merupakan partai baru dan menjadi lawan yang cukup sulit untuk dikalahkan oleh partai-partai lama. Pada pemilu 2009 suara yang diraih meningkat dari pada pemilu 2004 yang lalu dan ini

merupakan keberhasilan partai baru ini dalam mengalahkan lawan-lawan politiknya pada pemilihan umum.

Berikut ini adalah perolehan suara yang perolehan oleh partai peserta pemilu 2009 yang terbesar di Kota Yogyakarta.

Tabel 1.1
Perbandingan Perolehan Suara Lima Besar Partai Politik Pada Pemilu Legislatif Tahun 2004 dan 2009

No	Partai Politik	Tahun 2004		Tahun 2009	
		Perolehan Suara	Perolehan Kursi	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	59.758	15 kursi	47.414	11
2	Partai Demokrat	15.935	4	26.828	10
3	PAN	43.822	11	26.828	5
4	PKS	27.887	7	21.546	5
5	Golkar	27.445	7	15.868	5

Sumber: Website KPUD Kota Yogyakarta

Untuk anggota legislatif DPRD Kota Yogyakarta, dari 40 anggota DPRD Kota Yogyakarta, sepuluh di antaranya merupakan muka lama yang setengahnya adalah politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Mereka adalah Henry Kuncoroyekti dan Suharyanto (Dapil I), Chang Wendryanto dan Sujanarko (Dapil II) serta Suwarto (Dapil IV), RM Sinarbiyat Nujanat (Dapil I) dan Agus Prasetio (Dapil III) dari Partai Demokrat yakni. Dari PKS adalah Ardianto (Dapil I) dan M Zuhriif Hudaya (Dapil V). Serta R Bagus Sumbarja dari Partai Golkar (Dapil III).

Sementara itu anggota legislatif dari Dapil Kota Yogyakarta yang mewakili DPRD Propinsi DIY adalah Kol (Purn) Sukedi dan R Agung Prasetyo

(Demokrat), Nuryadi dan Yohanes Widi Pratomo (PDIP), Arif Noor Hartanto (PAN), Sukamta (PKS) dan Nurjanah (Golkar).⁴

Pendidikan politik merupakan wacana klasik, pada setiap periodisasi politik di Indonesia. Pendidikan bagi kader partai politik memiliki tujuan agar para kader mengetahui tujuan berdirinya partai politik, ideologi yang diterapkan serta platform dan program politik yang menjadi prioritas partai politik. Partai massa dan partai kader bukan sesuatu yang dikotomis, partai massa juga merupakan partai kader. Partai massa bukan hanya dilihat dari banyaknya anggota atau simpatisan yang terlibat dalam partai tersebut, akan tetapi sejauh mana partai mampu menjalin kedekatan dan membangun komunikasi dengan masyarakat secara luas, sehingga kepentingan masyarakat juga merupakan kepentingan partai untuk dapat diperjuangkan dan terlaksana melalui kebijakan yang mendukung kebutuhan masyarakat secara luas.

Partai politik berkewajiban untuk menciptakan kepemimpinan politik yang memiliki dedikasi dan kemampuan yang memadai. Rekrutmen kepemimpinan baik di eksekutif maupun di legislatif hendaknya melalui pengalaman berorganisasi yang baik, memiliki pengalaman advokasi, mampu berkomunikasi dengan massa rakyat yang terpolakan melalui partai politik.

Dosa partai politik adalah belum menciptakan banyak kader pemimpin dalam melaksanakan proses berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dibuktikan dengan minimnya pemimpin muda yang tampil dalam perebutan kekuasaan politik, baik di daerah maupun di tingkat nasional. Ini berarti terjadi stagnasi

⁴ Website KPU Kota Yogyakarta, *Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2009*, 11 November 2009, Jam 15.00 Wib

politik di negeri ini. Karena dalam setiap pemilihan kepala daerah maupun pemilu masih memunculkan tokoh-tokoh lama dalam kompetisi politik di tingkat daerah maupun nasional. Ini berarti pula progresivitas perkembangan masyarakat mengalami stagnasi. Pemilu idealnya memunculkan banyak kader muda dari partai politik yang memiliki loyalitas dan dedikasi melalui kaderisasi yang jelas untuk dapat tampil sebagai pemimpin masa depan.

Pemilu bukan hanya wahana bagi partai politik dan tokoh politik untuk mencapai kekuasaan, akan tetapi juga merupakan proses pendidikan politik bagi rakyat dan partai politik. Pemilu juga merupakan tontonan politik bagi rakyat, karena dalam pemilu rakyat akan menyaksikan program-program partai politik maupun tokoh politik yang berkompetisi dalam pemilu. Perubahan adalah janji politik dari setiap kontestan politik dalam pemilu. Perubahan akan terjadi jika ada regenerasi dalam kepemimpinan. Regenerasi kepemimpinan akan dapat terwujud melalui kaderisasi yang sistematis, dan niscaya bahwa regenerasi melalui proses kaderisasi kepemimpinan akan membawa perubahan yang lebih baik.

Politik secara ideal selalu berjalan dinamis dan kreatif dengan gagasan dan strategi politik untuk mencapai tujuan politik yang diinginkan. Motif pendirian partai politik yang beragam, ada hanya ingin mencari uang untuk kepentingan pribadi melalui pendirian partai politik, ada yang untuk eksistensi pribadi karena merasa mampu, memiliki massa dan pengaruh politik, serta ingin menjalankan misi ideologi yang diyakininya untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bila dikaitkan dengan perspektif teori kelembagaan, sebagaimana disinggung oleh moses maor,sebelum partai itu bertahan (persist) partai tersebut harus eksist (survive). Partai politik akan survive apabila dapat memberi manfaat kepada para kandidat partai politik tersebut maupun para pemilihnya pada pemilu. Selanjutnya Samuel P Huntington yang membahas tentang kelembagaan politik mengatakan bahwa agar partai politik harus survive, agar partai politik tersebut memiliki kelembagaan yang kuat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas,maka penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “ Bagaimana proses kaderisasi partai Demokrat di Kota Yogyakarta 2004 – 2009 ”?

C. Pembatasan Masalah

Salah satu fungsi partai politik melakukan Pendidikan politik bagi masyarakat anggotanya agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam peneltian ini pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Demokrat hanya dibatasi bagi anggota partai Demokrat di Kota Yogyakarta.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses kaderisasi partai Demokrat di Kota Yogyakarta tahun 2004 – 2006.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan peneliti sekaligus juga buat partai DEMOKRAT agar kedepan dapat menjadi masukan yang baik untuk kemajuan partai. Penelitian ini juga diharapkan menjadi sumbangan bahan bacaan ilmu pengetahuan pendidikan khususnya dibidang politik bagi mahasiswa kedepan.

E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori ini menggambarkan darimana problem riset berasal atau teori itu dikaitkan. Menurut Sofyan Effendi teori itu adalah: “Rangkaian kata-kata yang logis dari proposional akan lebih dan merupakan informasi ilmiah yang diperoleh dari dengan abstraksi pengertian-pengertian maupun hubungan proposisi”.⁵

Proposisi kerlinger mengatakan: “teori adalah seperangkat construct konsep yang saling berhubungan, defenisi-defenisi atau proposisi yang menjadikan pandangan secara sistematis dengan meramal gejala.”⁶ Dari beberapa teori yang disebutkan diatas disimpulkan bahwa teori adalah penggambaran fenomena yang telah terjadi, penulis menguraikan pengertian-

⁵ Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey, Pusat Penelitian Dan Kependudukan UGM*, Yogyakarta, 1981, hlm 25.

⁶ Wikifedia Indonesia, *Pengertian Partai Politik*, Senin 10 Oktober 2009, Jam 9.00 Wib

pengertian dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan variabel- variabel penelitian yang diteliti.

1. Partai Politik

a. Pengertian partai politik

Agar mendapat gambaran yang jelas dulu tentang apa itu partai politik, maka disini akan dijelaskan apa pengertian partai politik itu. Banyak sarjana-sarjana ilmu politik yang menjelaskan pengertian partai politik namun terdapat beberapa perbedaan yang tidak mendasar, berbeda sudut pandang dan cara pendekatan diantara mereka yang menyebabkan perbedaan tersebut dalam mendefenisikan pengertian partai politik.

Berikut ini beberapa pengertian tentang partai politik menurut para ahli:

- 1) Menurut Carl J Fredrich partai politik adalah “ sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan pengawasan terhadap pemerintah bagi pemimpin partainya dan berdasarkan pengawasan ini memberikan kepada anggota partainya manfaat yang bersifat ideal maupun material ”.⁷
- 2) Menurut Roger Soltau partai politik adalah “sekelompok warga Negara yang terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk

⁷ Soelistyati, Ismail Ghani, *Pengantar Ilmu Politik tahun 1989*, hlm 111-112

memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melakukan kebijakan mereka sendiri”.

- 3) Menurut Sigmund Neumann partai politik adalah “ merupakan organisasi dari aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai pemerintahan dengan merebut dukungan rakyat atas persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda”.⁸
- 4) Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah “suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang sama, tujuan kelompok ini adalah merebut kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka”.⁹

Secara umum pengertian partai politik dapat disimpulkan adalah suatu kelompok yang terorganisir dan mempunyai ideologi yang sama, berniat merebut kekuasaan dan mempertahankannya dari kelompok lain yang ingin merebut agar semua kebijakan yang mereka buat dapat berjalan sesuai harapan

Keikutsertaan seorang warga negara dalam politik merupakan partisipasi politik yang dijamin oleh undang-undang. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan yang baik itu secara langsung maupun tidak langsung. sebagai contoh partisipasi politik yakni

⁸ *Ibid*

⁹ *ibid*

kegiatan memilih dalam pemilihan umum, menjadi anggota partai politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan.

b. Tugas dan fungsi partai politik

Partai politik mempunyai beberapa tugas, diantaranya yakni:

1. Partai politik merupakan penghubung antar rakyat dengan pemerintah. Partai politik mengatur kemauan yang berbeda – beda dalam masyarakat. Selain itu keinginan – keinginan yang berbeda yang sangat rumit dan cenderung menimbulkan konflik dan gesekan dalam masyarakat. Partai politik bertugas menampung pendapat dan keinginan dari rakyat yang kemudian dirumuskan langkah – langkah yang tepat untuk disarankan kepada pemerintah untuk dijadikan program politik untuk kemaslahatan rakyat banyak.
2. Partai politik juga mempunyai tugas memperluas gagasan – gagasan atau ide – ide yang tersusun dalam program pemerintah.
3. Partai politik mempunyai tugas dan menumbuh kembangkan kesadaran nasional kader – kadernya serta masyarakat.
4. Partai politik juga memiliki tugas untuk memberi dan mengajak untuk ikut serta kepada masyarakat yang dianggap mampu dan layak untuk ikut serta dan aktif dalam lapangan kegiatan politik dan mendidik mereka untuk menjadi kader pemimpin masa depan.

5. Tugas lain dari partai politik adalah meredakan konflik. Partai politik mencari solusi pemecahan konflik yang terjadi serta merumuskan agar dapat meredakan konflik yang terjadi tersebut.

Partai politik juga mempunyai beberapa fungsi yang cukup mendasar yaitu:

1. Sosialisasi politik

Proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Proses ini berlangsung secara seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, non formal, dan informasi lainnya secara sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari – hari dalam lingkungan keluarga dan tempat tinggalnya.

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada. Disamping itu sosialisasi politik juga mencakup proses melalui mana masyarakat menyampaikan norma – norma dan nilai – nilai bagi generasi berikutnya. Dalam pemilihan umum sebagai salah satu cara untuk memperoleh kekuasaan partai politik harus memperoleh dukungan yang sebesar – besarnya dari masyarakat. Untuk itu partai politik berusaha menciptakan citra dalam masyarakat bahwa partai tersebut merangkul kepentingan umum.

2. Rekrutmen politik

Pemilihan dan seleksi atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peran dalam system politik pada umumnya dan pemerintah khususnya.

3. Partisipasi politik

Kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pimpinan pemerintah melalui pemilihan umum.

4. Pemandu kepentingan

Untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses politik, pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

5. Komunikasi politik

Proses penyampaian informasi mengenai mengenai politik mengenai hal politik dari pemerintah kepada masyarakatnya.

6. Pengendalian konflik

Konflik yang ditimbulkan oleh sebuah system politik melalui lembaga demokrasi untuk mendapatkan penyelesaian dalam bentuk keputusan politik untuk kepentingan bersama.

7. Kontrol politik

Kegiatan untuk menunjukkan kelemahan, kesalahan, dan penyimpangan dari sebuah kebijakan atau penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.¹⁰

c. Klasifikasi partai politik

Secara umum dikenal ada dua system kepartaian yakni partai massa dan partai kader.

1. Partai massa

Partai massa merupakan partai yang mengutamakan banyak anggotanya, oleh karena itu biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat untuk bernaung dibawah satu bendera partai tertentu dalam memperjuangkan kepentingannya.

2. Partai kader

Partai kader lebih mementingkan ketaatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pemimpin partai kader biasanya selalu menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memberhentikan anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan.¹¹

¹⁰ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, jakarata, 1992, hlm 116-121.

¹¹ *Ibid*

Selain klasifikasi diatas masih terdapat klasifikasi lainnya, Menurut Maurice Duverger didalam bukunya yang berjudul *political parties* terdapat tiga klasifikasi yaitu:

1. System Partai Tunggal (one party system)

System partai tunggal terjadi apabila dalam suatu negara hanya terdapat satu partai saja yang berperan, maka negara dinyatakan menganut system partai tunggal. Walaupun ada partai lain akan tetapi perannya tidak kelihatan dominan.

2. System Dwi Partai

Umumnya system dwi partai dianut oleh negara dimana terdapat dua partai yang memainkan peran dalam percaturan politik dinegara tersebut. Pada saat pemilihan umum partai yang memenangkan pemilu akan dengan sendirinya memegang kekuasaan tertinggi sedangkan yang kalah akan menjadi oposisi.

3. System multi partai

Sisem multi partai biasanya dianut oleh negara yang terdapat beberapa partai politik(lebih dari dua), dan diantara partai tersebut ada yang memiliki kekuasaan yang berkesinambungan.¹²

d. Organisasi partai

Maurice Duverger dalam *political parties*¹³ membedakan organisasi partai menjadi :

¹² *Ibid*, hlm 167-169

1. Organisasi yang vertical, yang melihat pada satuan-satuan yang merupakan basis dan kegiatan dari partai itu, tersusun dari hirarki keatas,keseluruhannya merupakan mesin partai.
2. Organisasi yang horizontal, pembagian ini berdasarkan siapa yang menjadi anggotanya.

Dalam susunan yang horizontal ini dapat dibedakan antara partai langsung (directorates) dan partai tidak langsung (indirect parties). Dalam partai langsung, anggota-anggotanya adalah individu atau perorangan. Jadi beranggotakan langsung orang. Sedangkan partai tidak langsung anggota-anggotanya kolektif atau grup sebagai salah satu keseluruhan dalam satu partai. Didalam bentuknya yang murni partai tidak mempunyai anggota individu atau perorangan akan tetapi menghimpun satu organisasi yang sudah ada. Dasar dari susunan vertical ini merupakan elemen dasar. Macam-macam elemen yaitu caucus, branch, cell dan militia.

Caucus adalah suatu satuan dasar dari sebuah partai politik yang terdiri atas golongan kecil orang dan merupakan satu kesatuan yang tertutup oleh partainya. Orang tidak mudah untuk masuk kedalamnya dengan melalui seleksi yang diadakan oleh anggota-anggota yang telah ada, karena pengaruhnya. Masuknya orang tersebut dalam caucus diharapkan dapat membantu dalam kemenangan pemilihan. Kekuatan caucus terletak pada kualitas

¹³ Soelistiyati, Ismail Ghani, *Pengantar Ilmu Politik*, hlm 116

anggotanya. Puncak kegiatannya adalah saat pemilihan, oleh karena itu maka caucus dibentuk dengan daerah-daerah kerja, daerah pemilihan yang penting. Caucus selanjutnya masih dibedakan menjadi dua yakni caucus langsung yang anggotanya terdiri atas kaum elite-elite (middle class) dan caucus tidak langsung anggotanya adalah wakli-wakil yang ditunjuk oleh kolektif anggota partai tersebut.

Elemen dasar dari organisasi yang kedua adalah branch yang merupakan bagian yang tidak terlepas dari ikatan partai dan merupakan satuan yang terbuka, bahkan justru selalu berusaha untuk memperluas anggotanya. Disamping itu branch mempunyai organisasi administrasi yang lebih sempurna dan lebih permanen.

Cell merupakan satuan dasar dari suatu partai. Dalam cell dasar pembentukannya adalah lingkungan-lingkungan pekerja, yaitu menghimpun orang-orang pekerja pada satu tempat yang sama. Pada cell jumlah anggota tiap distriknya antara 50 sampai 60 orang. Cell ideal jumlah anggotanya lebih sedikit yaitu antara 15 sampai 20 orang saja. Dengan demikian ada hubungan yang tetap antara anggota-anggotanya, serta rasa solidaritas partai lebih kuat dirasakan.

Elemen dasar yang keempat adalah militia yaitu semacam tentara pribadi atau lascar yang diorganisasi secara hirarkis didalam

ketentraman, jadi didalam militia terdapat pembagian kelompok seperti regu dan lain-lain.

Huntington mendefenisikan pelebagaan politik sebagai proses dimana organisasi dan prosedur memperoleh nilai baku dan stabil. Huntington mengukur tingkat kelembagaan politik ini dari tingkat adaptabilitas, komfleksitas, otonomi dan kohensi. Menurutnya semakin mudah organisasi menyesuaikan diri(adaptasi), semaikn tinggi pula derajat kelembagaanya. Begitu pula semakin tinggi tantangan yang timbul dan semakin tua umur organisasi semakin besar pula kemampuanya menyesuaikan diri terhadap lingkungannya(*beradaptasi*).¹⁴

Terkait dengan masalah diatas ada beberapa indicator penting yang perlu diperhatikan dalam pelebagaan partai politik yang berbeda :

Pertama, tingkat perkembangan organisasi pada pusat kekuasaan, dimana partai politik dengan pelebagaan yang kuat umumnya memiliki birokrasi pusat yang kuat.

Kedua, tingkat homogenitas pada level hirarki yang sama cenderung memiliki struktur yang sama dengan organisasi pada tingkat nasional.

Ketiga, pendanaan organisasi semakin bersifat regular dan berasal dari berbagai sumber.

¹⁴ Samuel P. Hungtington, *Political Order in Changing Societies* (New Haven and London, Yale University Press 1968), Hlm 8-31

Keempat, tingkat kesesuaian antara norma-norma hukum dan struktur kekuasaan yang actual. Tingkat kesesuaian antar keduanya lebih besar dalam partai politik yang memiliki kelembagaan kuat.

Kelima, hubungan dengan organisasi-organisasi onderbouw, dimana partai politik dengan pelembagaan yang kuat mendominasi organisasi-organisasi eksternalnya.

2. Pendidikan politik

a. Pengertian pendidikan politik

Di bawah ini dikemukakan beberapa pengertian pendidikan politik :

- 1) Menurut Paulo Freire pendidikan politik dibagi dalam beberapa batasan yakni yang dimaksud dengan “ pendidikan ” adalah proses menumbuhkan sisi-sisi kepribadian manusia secara seimbang dan integral, maka “pendidikan politik” dapat dikategorikan sebagai dimensi pendidikan, dalam konteks bahwa manusia adalah mahluk politik. Sebagaimana halnya bahwa pendidikan politik mempunyai fungsi-fungsi pemikiran moral dan ekonomi maka pendidikan politik juga mempunyai fungsi politik yang akan direalisasikan oleh lembaga-lembaga pendidikan.¹⁵
- 2) Menurut Sarwono Kusumaatmaja pendidikan politik adalah :
 “Dunia pendidikan dan dunia politik adalah khasanah yang berbeda. Hakekat pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia secara utuh dan paripurna, sedangkan dunia politik sangat erat kaitannya

¹⁵ Paulo Freire, *Politik Pendidikan, Pustaka Pelajar, Cetakan VI 2007*. hlm 229

dengan proses bertindak dan mekanisme kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan visi dan platform perjuangannya”.¹⁶

3) Menurut Safrudin pendidikan politik adalah :

“Aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan memunculkan orientasi-orientasi politik pada individu. Aktifitas ini meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap soal politik dan sikap politik. Disamping itu, ia bertujuan agar setiap individu mampu berpartisipasi politik yang aktif dimasyarakatnya. Pendidikan politik adalah aktifitas yang terus berlanjut sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali di dalam masyarakat yang hidup bebas.”¹⁷

b. Kepribadian politik

Pembentukan kepribadian politik dilakukan melalui metode tak langsung, yaitu pelatihan dan sosialisasi, serta metode langsung berupa pelajaran politik dan sejenisnya.

c. Kesadaran politik

Proses penumbuhan kesadaran politik dapat ditempuh dalam beberapa metode antara lain : dialog dan pengajaran instruktif. Adapun partisipasi politik terwujud dalam keikutsertaan individu-individu secara sukarela dalam kehidupan politik masyarakatnya.

¹⁶ Sarwono Kusumaatmadja, *Pendidikan Politik Bangsa*, www.sarwono.net

¹⁷ Safrudin, *Pendidikan Politik*, “ Buah Dari Pendidikan Politik “

d. Partisipasi politik

Pendidikan politik didalam masyarakat manapun mempunyai institusi dan perangkat yang menopangnya. Yang paling mendasar adalah keluarga, sekolah, tempat kerja dan partai-partai politik serta lembaga-lembaga politik lainnya termasuk juga media massa/elektronik. Pendidikan politik memiliki dasar idoologis, social dan politik bertolak dari sinilah semua tujuan akan dirumuskan.

3. Kaderisasi

a. Pengertian kaderisasi

Salah seorang proklamator Indonesia, Ir Soekarno, pernah mengatakan “Aku menghadapi kenyataan bahwa negeriku miskin, malang dan dihinakan oleh bangsa-bangsa lain”.¹⁸ Pernyataan ini adalah sebuah cetusan hati yang jujur dari seorang pendiri bangsa Indonesia, dan saat inipun terasa bahwa pernyataan tersebut masih sangat relevan. Seorang proklamator yang lain, M.Hatta, mencoba memberi sebuah arahan untuk menyikapi masalah tersebut, “Kita harus mengajar para intelektual yang muda-muda, yang pada suatu saat akan menggantikan kita untuk meneruskan cita-cita bangsa ini. Mendidik bangsa ini agar menjadi bangsa yang rasional dan berpengetahuan. Tujuan akhir dari semua ini adalah untuk mewujudkan suatu keadaan dimana diri kita dan kader-kader kita akan menjadi pemikir, pejuang dan pemimpin bagi agama,

¹⁸ Google.com, *Kader Masa Depan Bangsa*, Senin 19 oktober 2009, Jam 19.20 Wib

bangsa dan kemanusiaan. Ini adalah janji kepada tanah air. Ini merupakan soal prinsip. Soal kehormatan suatu bangsa.”¹⁹.

Kaderisasi diartikan sebagai usaha mempersiapkan calon-calon pemimpin hari esok yang tangguh dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas khairu ummah, umat terbaik.²⁰ Dalam kaderisasi pasti memberikan pengarahan dan pelatihan. Masalahnya adalah terkadang atau sering hal – hal yang disampaikan tidak dilakukan oleh pemberi pelatihan di kehidupan sebenarnya. Contoh, dalam kaderisasi pemberi pelatihan mengatakan bahwa kita harus disiplin, tapi ternyata ketika dia rapat untuk mempersiapkan kaderisasi, dia sering terlambat. Hal inilah yang membuat banyak kaderisasi saat ini tidak berjalan. Dalam mengkader, tidaklah sembarangan sehingga kadernya menjadi taat dan melaksanakan apa yang telah ditetapkan partai.

b. Bentuk dan jenjang pelatihan

Kegiatan utama dari usaha pengembangan sumber daya manusia adalah pendidikan dan pelatihan. Pelatihan diartikan oleh Ivancevich (1995) sebagai “usaha meningkatkan kinerja karyawan dalam pekerjaannya sekarang dan yang lain yang akan dijabatnya segera ”. Ivancevich mengemukakan beberapa point penting antara lain :²¹

1) Pelatihan (*Traning*) adalah “sebuah proses sistematis untuk meningkatkan kinerja organisasi”. Pelatihan terkait dengan

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ Ahmad S Ruky, *Sumberdaya Manusia Berkualitas, Mengubah Visi Menjadi Realitas, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006* hlm 230-231.

keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pelatihan berorientasi pada masa yang sekarang dan membantu karyawan untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya”.

- 2) Program pelatihan formal adalah “ usaha yang dilakukan oleh majikan (organisasi/perusahaan) untuk member kesempatan kepada karyawan agar menguasai pekerjaan lebih terampil, pengetahuan dan sikap yang dibutuhkan”.
- 3) Belajar (*learning*) adalah tindakan “ tindakan yang dilakukan oleh pihak karyawan dalam usaha meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang dibutuhkan yang menyebabkan dampak perubahan yang permanen dalam perilaku kerja mereka”.
- 4) Keterampilan (*skill*) adalah “ setiap perilaku kerja yang telah dipelajari”. Oleh karena itu, apa yang akan dicapai melalui pelatihan adalah peningkatan keterampilan yang diperlukan. Keterampilan yang biasanya menjadi target utama adalah apa yang menjadi keunggulan dari individu/kelompok, antara lain yang bersifat motorik (menggunakan alat tubuh), kognitif (kemampuan menggunakan nalar atau analisis), dan verbal (berkomunikasi) yang juga disebut keterampilan “interpersonal”.²²

²² *Ibid*

c. Prinsip dasar pelatihan

Berdasarkan pada pengalaman para penelitian para ahli, ada beberapa prinsip pelatihan yang dikemukakan oleh Dale Yoder dalam bukunya *personal principles and polities*, yakni adalah :

1) *Individual Deffences*

Tiap-tiap individu mempunyai cirri-ciri khas yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, baik mengenai sikap, sifat, tingkah laku maupun pekerjaannya.

2) *Relations To Job Analisis*

Analisis jabatan memiliki tugas utama untuk memberikan pengertian atas tugas yang harus dilaksanakan didalam satu pekerjaan.

3) *Motivation*

Motivasi adalah dorongan dari dalam dan luar diri seseorang untuk mengerjakan pekerjaannya.

4) *Aktive participation*

Didalam melaksanakan pendidikan training (latihan) para pegawai atau peserta harus turut aktif mengambil bagian dalam pembicaraan-pembicaraan mengenai pelajaran yang diberikan.

5) *Selection Of Trainees*

Latihan sebaiknya diberikan kepada mereka yang berminat dan menunjukkan bakal untuk dapat mengikuti latihan itu dengan berhasil.

6) *Selection trainer*

Tidak semua orang dapat menjadi pelatih.

7) *Trainees training*

Pelatihan sebelum disertai tanggung jawab untuk memberikan pekerjaan hendaknya telah mendapatkan pendidikan khusus untuk menjadi tenaga pelatih.

8) *Training methods*

Suatu latihan akan berhasil tidak hanya tergantung kepada tenaga pelatih saja, akan tetapi tergantung pada metode yang dipergunakan.

9) *Principles Of Learning*

Dalam latihan asas/ dasar dari ilmu pengetahuan juga harus diperhatikan.²³

d. Metode pelatihan

Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Koentjoroningrat bahwa, “ dalam arti sesungguhnya, maka method (methodis) adalah suatu cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut cara kerja yaitu memahami objek yang menjadi sasaran”.

Sedangkan metode pelatihan adalah metode yang dipergunakan dalam melaksanakan pelatihan ” metode pelatihan itu banyak sekali jenisnya dan tidak ada satupun metode yang paling tepat dari metode lainnya”. Oleh karena itu, metode-metode yang digunakan dalam

²³ Dikutip Martoyo,1987 ,hlm 64, Dalam Martina Wulandari, Fungsi Pelatihan Kerja Dalam Meningkatkan SDM, *Skripsi*, UMY, 2002, hlm 12-13.

pelatihan disesuaikan dengan jenis pelatihan yang akan diberikan kepada kelompok/organisasi. Namun demikian dalam garis besarnya metode-metode pelatihan itu dapat digolongkan dalam tiga golongan besar yakni:

1) Metode kuliah

Metode kuliah adalah proses penyampaian informasi dan pengertian dari pelatih kepada peserta pelatihan dalam waktu relatif singkat. Metode ini sangat efektif, tidak efektif atau membosankan tergantung pelatih yang memberikan kuliah, walaupun demikian ketiadaan proses belajar aktif dan terbatasnya kepada umpan balik mengurangi efektivitas metode ini selain biayanya yang murah. Dan ingatan terhadap materi yang diberikan relatif rendah, sehingga kuliah-kuliah harus dilengkapi dengan kesempatan untuk mempraktekkan informasi yang diperoleh.

2) *Case method and incident method*

Case method adalah suatu metode dimana para peserta diberikan suatu kasus untuk dipecahkan dan dianalisa. Kasus-kasus ini digunakan untuk merangsang peserta agar bisa lebih mendalami topik yang dibicarakan seperti dengan simulasi sebuah kasus sederhana atau kasus yang kompleks.

Incident method adalah suatu metode dimana para peserta diberikan suatu insiden dalam bentuk laporan tertulis yang pendek, kemudian keterangan selanjutnya dicari oleh peserta sendiri dengan mengajukan pertanyaan kepada pelatih atau seseorang yang telah

ditentukan untuk memberikan informasi. Kemudian peserta diminta untuk memecahkan masalah tersebut dan mengambil kesimpulan serta selanjutnya dinilai oleh peserta lain.

Ada persamaan dan perbedaan antara case method dengan incident method antara lain yakni apabila pada case method peserta diberikan gambaran masalah 80%, sedangkan incident method peserta diberikan gambaran masalah 25% saja selebihnya peserta mencari sendiri. Kelemahan keduanya antara lain :

1. Pemakaian kasus lama menjadi kurang baik, karena saat kasus itu terjadi sudah jauh berbeda saat diceritakan.
2. Tidak segera mengetahui efektivitas dari metode tersebut.²⁴

e. Evaluasi pelatihan

Tujuan dari fase evaluasi adalah menilai apakah pelatihan yang telah dilaksanakan tersebut benar-benar efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah diterapkan.

Bila pelatihan yang telah dilaksanakan dinilai yang diitelah mencapai hasil yang telah diinginkan, pelatihan tersebut dapat dianggap “berhasil guna“, Evaluasi terhadap pelatihan yang benar harus dilakukan dalam empat tahap dan tiap tahapnya mempunyai tujuan dan tolak ukur yang berbeda. Empat tahap dalam evaluasi aelatihan adalah :²⁵

²⁴ *Ibid*

²⁵ Dr. H. Ahmad S Ruky, *Sumberdaya Manusia Berkualitas, Mengubah Visi Menjadi Realitas, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, Hlm 248-249*

a. Keefektifan pelaksanaan pelatihan

Evaluasi jenis ini adalah evaluasi tahap yang pertama dan hanya mengukur bagaimana reaksi peserta pelatihan, kemampuan instruktur, penyelenggaraan pelatihan itu sendiri dan penilaian mereka tentang yang telah dipelajari selama pelatihan. Cara yang bisa dilakukan adalah meminta para peserta untuk mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang reaksi dan kesan mereka atas penyelenggaraan pelatihan tersebut. Pertanyaan biasanya berkisar topik-topik yang dibahas apakah bermanfaat atau tidak, kemampuan pengajar dalam melaksanakan pelatihan, dan aspek-aspek penyelenggaraan pelatihan itu sendiri.

b. Penyerapan/retensi materi

Tujuan evaluasi tahap ini adalah mengukur sejauh mana materi yang diberikan selama pelatihan telah dipahami, dihayati dan diingat oleh para peserta. Pengukuran biasanya dilaksanakan dalam bentuk “test pasca pelatihan” yang dilakukan pada hari-hari terakhir dari pelatihan dan diulangi lagi tiga sampai enam bulan setelah pelatihan selsesai.

c. Dampak dari pelatihan pada perilaku kerja

Tujuan evaluasi tahap ini adalah mengukur perubahan perilaku kerja yang terjadi setelah mereka mengikuti pelatihan. Apakah perilaku kerja berubah setelah ikuti pelatihan seperti yang diharapkan dan seberapa besar derajat perubahan tersebut. Evaluasi seperti ini harus

dilakukan oleh atasan langsung dari karyawan yang telah mengikuti pelatihan dengan mencatat perubahan-perubahan tersebut.

Evaluasi juga bisa dilaksanakan dengan memintanya dari pelanggan yang dilayani oleh karyawan tersebut atau oleh pelanggan internal, yaitu pelanggan atau pejabat lain yang juga dilayani oleh karyawan tersebut. Misalnya, petugas rekrutmen dari sumber daya manusia dievaluasi oleh pejabat-pejabat yang dilayaninya.

d. Dampak Pada Kinerja Organisasi

Tujuan dari evaluasi ini adalah adalah mengukur apakah pelatihan-pelatihan yang diberikan telah benar-benar berdampak positif pada kinerja organisasi (perusahaan), baik secara keseluruhan maupun per divisi/diktoral.

Untuk melakukan mengukur tahap ini diperlukan indikator-indikator untuk hasil pelatihan berruang lingkup organisasional, misalnya kenaikan tingkat produktifitas, kenaikan volume penjualan, pengurangan tingkat kecelakaan kerja, penurunan keluhan pelanggan dan lain sebagainya. Pengukuran harus dilakukan oleh pimpinan perusahaan dan kepala ditiap-tiap unit kerja diperusahan tersebut.²⁶

²⁶ *Ibid*

4. Rekrutmen Politik

a. Pengertian Rekrutmen politik

Rekrutmen politik pada esensinya adalah penyeleksian individu-individu yang berbakat untuk menduduki jabatan politik atau jabatan pemerintahan.²⁷

Menurut Jack C. Plano rekrutment politik adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi peranan dalam sistem sosial. Perekrutan politik ditandai dengan terisinya posisi formal dan legal seperti presiden, anggota DPR, DPRD, begitu juga peranan yang kurang formal misalnya pembujuk, aktivis partai dan propagandis.²⁸

Adapun cara yang ditempuh dalam rekrutmen politik adalah kontak-kontak pribadi, persuasi, dan juga dapat dilaksanakan dengan cara menarik golongan muda untuk didik menjadi kader dengan harapan dimasa yang akan datang dapat menduduki jabatan politik ataupun jabatan pemerintahan. Fungsi rekrutmen politik ini semakin besar porsinya manakala partai politik adalah partai tunggal seperti halnya didalam sistem politik totaliter atau manakala partai tersebut merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem demokratis. Selain itu fungsi rekrutmen politik sangatlah penting terhadap kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu

²⁷ Haryanto, *Sistem Suatu Politik Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1982, hlm 46.

²⁸ Jack C. Plano, *Kamus Analisa Politik*, Jakarta, Rajawali, 1985, hlm 211.

melaksanakan peran dan tanggung jawabnya, maka kelangsungan system politik akan terancam.

Biasanya proses perekrutan yang dilaksanakan dan diterapkan oleh masing-masing partai berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tetapi terdapat suatu kecendrungan bahwa individu-individu yang berbakat yang dicalonkan untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan mempunyai latar belakang yang hampir sama, yaitu bahwa mereka berasal dari kelas menengah atau kelas atas dan walaupun mereka berasal dari kelas bawah maka mereka merupakan orang-orang yang telah memperoleh pendidikan yang memadai.²⁹ Hal seperti ini disebabkan karena adanya tuntutan teknologi dan zaman yang semakin maju dan modern, maka jabatan politik dan jabatan pemerintahan sangat membutuhkan orang-orang yang memiliki keterampilan dan kecakapan yang relatif sulit didapatkan diluar pendidikan dan latihan.³⁰ Pada umumnya pelaksanaan rekrutmen politik dapat dibedakan menjadi dua tahap:

1. Perekrutan Terbuka

Semua warga masyarakat tanpa terkecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk direkrut apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Setiap masyarakat yang berbakat dan ahli

²⁹ Haryanto, *Op.Cit*

³⁰ *Ibid*

dibidangnya mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik atau pemerintahan.

2. Perekrutan Tertutup

Perekrutan jenis ini hanya terbatas pada individu-individu tertentu saja yang dapat direkrut untuk menduduki jabatan politik dan pemerintahan. Dalam rekrutmen tertutup ini, kesempatan tidak terbuka untuk semua masyarakat. Perekrutan hanya dilaksanakan untuk kalangan tertentu saja, misalnya perekrutan karena keturunan, keluarga, persamaan darah dengan pengusaha. Jadi dalam rekrutmen tertutup ini kesempatan untuk menduduki jabatan politik dan pemerintah sangatlah kecil.

b. Proses Rekrutmen Politik

Dalam rangka untuk meningkatkan representasi caleg sehingga dapat terpilih dalam parlemen harus melewati rintangan krusial antara lain :

i. Menyeleksi diri sendiri.

Tahap ini merupakan tahap dasar bagi caleg untuk memutuskan akan ikut seleksi atau tidak untuk jabatan publik (politik). Keputusan ini dapat dilandasi oleh dua faktor antara lain : ambisi pribadi atau kesempatan untuk mencalonkan diri. Terkadang bagi caleg ini kesempatan untuk mencalonkan diri tetapi ini tidak

mudah namun ini langkah yang penting untuk memperoleh representasi publik.

ii. Seleksi oleh partai

Tahapan selanjutnya adalah seleksi oleh partai, proses nominasi para kandidat adalah salah satu peran urgen yang dimainkan oleh partai-partai politik. Prosedur nominasi bervariasi antar negara dan dapat dibedakan oleh sejumlah gambaran yang meliputi napas partisipasi dan sentralisasi atau desentralisasi dari proses rekrutmen politik. Memberikan kesempatan yang besar bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif.

iii. Melakukan pemilihan

Tahapan ini dilakukan oleh pemilih dalam pemilihan umum untuk memilih kandidat yang telah mencalonkan diri sebagai caleg. Terpilih atau tidaknya seorang caleg dalam pemilihan umum sangat tergantung pada konsituennya.³¹

F. Defenisi Konsepsional

Konsep adalah suatu bentuk konkrit dari dunia luar dan kemudian ditetapkan dalam alam pikiran sehingga manusia dapat mengenal berbagai gejala yang ada. Dalam pemikiran sosial konsep dapat diartikan abstraksi dari

³¹ *Ibid*

suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik, kejadian, dan keadaan individu atau kelompok tertentu.³²

Yang dimaksud dengan defenisi konseptual adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan yang lainnya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ada beberapa bentuk konkrit yang merupakan hasil pengenalan yang telah lama berlangsung, yakni :

1. Partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh warga negara republic Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan cita-cita, ide-ide dan pandangan politik untuk memperjuangkan kepentingan kelompok masyarakatnya dan sarana untuk mencari kekuasaan.
2. Pendidikan politik adalah : “ Proses membentuk dan menumbuhkan orientasi–orientasi politik pada individu ”.
3. Kadersasi adalah “ sebuah transformasi nilai-nilai dan pengoptimalan potensi-potensi manusia untuk menduduki jabatan tertentu baik itu politik dan pemerintahan biasanya dilakukan oleh partai politik ”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian deskriptif.

Penelitian deskriptif menurut Winarno Surachman adalah :³³

“Penelitian deskriptif adalah merupakan istilah yang umum dan mencakup beberapa teknik deskriptif diantaranya penelitian yang menuturkan,

³² Marsi Singaribun, *Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, 1991*, hlm 34.

³³ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik, Tarsito, Bandung, 1989*, hlm. 140.

mengklarifikasi, menggambarkan dan menganalisa data serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada saat sekarang ini dengan menggunakan teknik interview dan dokumentasi ".

Dengan demikian jenis penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang menerangkan, menggambarkan, menuturkan dan menjelaskan serangkaian peristiwa atau kejadian yang terjadi dilapangan.

2. Unit Analisa

Unit analisa adalah pengurus DPC Partai Demokrat Kota Yogyakarta.

3. Jenis Data

Jenis data berisi penjelasan tentang jenis data yang diperlukan dalam penelitian. Data merupakan informasi mengenai keberadaan konsep penelitian yang kita peroleh dari unit analisa yang dijadikan sebagai sarana verifikasi empiris dalam kegiatan penelitian. Menurut teknik pengumpulan datanya, jenis data penelitian dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian (yang berkaitan dengan data) yang diperoleh secara langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari, yaitu peran DPD Partai Demokrat dalam pendidikan politik kader.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi berupa buku-buku ilmiah, hasil penelitian lain, data statistic, media massa/televisi dan dokumentasi yang diperlukan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka teknik yang digunakan adalah :

- a. Wawancara, yaitu penelitian yang diadakan dengan cara tanya jawab secara langsung baik lisan maupun tulisan tentang masalah yang dibahas. Wawancara dilakukan dengan respondennya yaitu :
 1. Ketua Partai DEMOKRAT Kota Yogyakarta
 2. Anggota Partai sebanyak 5 orang
 3. Masyarakat Umum 10 orang

Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan purposive random sampling yang tidak berpatokan pada jumlah responden dan hanya disesuaikan kebutuhan penelitian saja.³⁴

- b. Dokumentasi atau biasa disebut studi pustaka, yaitu mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara melihat data, arsip, dokumen, grafik dan gambar. Dokumentasi tersebut diambil dari Kantor DPC Demokrat yang ada di kota Yogyakarta.
- c. Observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung objek penelitian. Observasi dilakukan di DPC Demokrat kota Yogyakarta.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan cara analisa kualitatif interpretatif. Analisa kualitatif interpretatif adalah penelitian

³⁴ Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, UII Press, 2007, hlm 124.

dengan berusaha meginterpretasi fenomena-fenomena yang ada, muncul, terjadi dari data-data yang terkumpul tanpa menggunakan perhitungan statistik. Pendekatan interpretatif dalam ilmu social dimulai dengan pemahaman data/fakta yang dikumpulkan dan kemudian dianalisa melalui pemahaman intelektual yang dibangun atas dasar empiris.

Winarno Surakhman mengatakan bahwa analisis data yang digunakan dalam studi ini meliputi empat tahapan berikut ini :

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan dengan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka.

b. Pencocokan data

Pencocokan data dilakukan agar data yang diperoleh sesuai dengan yang ada dilapangan.

c. Interpretasi data

Langkah interpretasi data ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penilaian data, akan tetapi langkah ini lebih memerlukan kecermatan yang harus dibekali seperangkat kerangka konseptual yang telah disusun.

d. Penarikan kesimpulan dari pengumpulan, penilaian dan interpretasi data.³⁵

³⁵ Winarno Surachman, *Op Cit*, hlm. 140.